

RINGKASAN

PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM ADMINISTRASI

Oleh : Lanny Ramli , SH, M.Hum
Dr. Nursyam, MSi.

2006

Jumlah halaman 43 Halaman

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memberikan pelayanan publik ditinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi ? ; Bagaimana peran peraturan perundang-undangan agar dapat mendorong perilaku positif PNS dalam memberikan pelayanan publik ? ; Bagaimana pola pengembangan perilaku PNS agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : ingin mengkaji perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memberikan pelayanan publik ditinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi ; ingin mengkaji peran peraturan perundang-undangan agar dapat mendorong perilaku positif PNS dalam memberikan pelayanan publik ; ingin mengkaji pola pengembangan perilaku PNS sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dan Hukum Administrasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ditambah temuan di lapangan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Bahan hukum primer digunakan berupa hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perilaku PNS dalam memberikan pelayanan publik . Bahan sekunder meliputi buku literatur dalam bidang Hukum Administrasi maupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

Dalam penelitian ini dibahas dan disimpulkan sebagai berikut : (1)
Ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku PNS

dalam memberikan pelayanan publik yang diatur dalam UU, Peraturan pemerintah, Inpres, KepMen, maupun perda. Pengaturan perilaku PNS memang merupakan hal yang sangat penting akan tetapi jika terlalu banyak peraturan justru akan menimbulkan suatu kesulitan dalam memahami maupun melaksanakannya di lapangan. Begitu juga bagi masyarakat akan mengalami kendala jika ingin ikut berpartisipasi dalam mendorong PNS untuk terus berperilaku yang lebih positif. Untuk meningkatkan perilaku positif PNS perlu adanya pendekatan yang bersifat holistik dan komprehensif sehingga diperlukan beberapa pendekatan yaitu : Pendekatan Legal, Pendekatan Moral , Pendekatan Administratif, Pendekatan Etos Kerja. (2) Pembinaan hukum diperlukan untuk dapat mendorong perilaku PNS ke arah yang lebih konstruktif dan dinamis. Pembinaan hukum harus dapat mendorong birokrasi untuk dapat merubah perilaku PNS agar pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penegakan hukum dan pembinaan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik hendaknya dapat menciptakan pelayanan yang adil dan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan , baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata. (3) Pengembangan profesionalisme sebagai pola pengembangan perilaku PNS merupakan hal yang tepat karena di dalam profesionalisme perilaku PNS akan selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum, Kode Etik serta transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dengan Profesionalisme PNS bukan hanya mementingkan masyarakat akan tetapi juga akan menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat serta PNS itu sendiri. Profesionalisme bukan hanya untuk PNS bagian teknis saja akan tetapi profesionalisme juga dituntut bagi PNS yang menjadi pejabat tingkat bawah maupun atas.

Adapun saran yang diberikan adalah : (1) Perlu adanya kajian berkaitan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perilaku PNS . Hal ini dimaksudkan agar ada suatu peraturan yang khusus

berkaitan dengan perilaku PNS sehingga masalah-masalah yang ada di lapangan dapat dipahami dengan mudah baik bagi PNS itu sendiri maupun oleh masyarakat, sehingga dengan demikian diharapkan akan dapat lebih dipedomani sebagai suatu acuan untuk meningkatkan perilaku PNS lebih positif. (2) PNS perlu terus dikembangkan ke arah yang semakin professional sehingga citra PNS akan semakin positif dan disegani masyarakat. Pengembangan profesionalitas yang telah dicanangkan oleh pemerintah harus terus disambut dengan aturan-aturan yang lebih implementatif sehingga betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat dan betul betul membawa negara dan bangsa ini menjadi lebih maju dan berbudaya.

- kata kunci = Pegawai negeri sipil ; Pelayanan publik

Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNAIR

Dibiayai : DIKTI, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Surat Perjanjian No: 318/SP3/PP/DP2M/II/2006 Tgl 1 Pebruari 2006

SUMMARY

BEHAVIORAL PUBLIC SERVANT CIVIL IN GIVING EVALUATED PUBLIC SERVICE FROM THE ASPECT OF LOOK INTO THE ADMINISTRATION LAW

By : Lanny Ramli, SH, M.Hum.
Dr. Nursyam MSi.

2006

Page amount 43page

Problems raised in this research is : How behavior of Public Servant Civil (PNS) in giving evaluated Public service from the aspect of look into the Administration Law?; How role of law and regulation so that can push the positive behavior of PNS in giving Public Service?; How behavioral development pattern of PNS so that can give the more professional public service?

As for intention of this research is : wishing to study the behavior of Public Servant Civil (PNS) in giving evaluated Public service from the aspect of look into the Administration Law; wish to study the role of law and regulation so that can push the positive behavior of PNS in giving Public Service ; Wish to study the behavioral development pattern of PNS as according to public service principles and Punish the Administration.

This research represent the law research having the character of normative. Substance punish in this research is consisted of by the substance punish the primary and substance punish the sekunder added by a field data of related to the root of the matter research. Substance punish the primary used by in the form of positive law that is law and regulation of related to behavior PNS in giving public service. substance Sekunder cover the literature book in

the field of Law of and also Administration other area related to the root of the matter research.

In this research is studied and concluded as follows : (1) There is a lot of law and regulation arranging about Behavior PNS in giving public service arranged in UU, Governmental Regulation, Inpres, KepMen, and also Perda. It is true Behavioral arrangement of PNS represent the very important matter however if too much regulation exactly will generate a[n difficulty in comprehending and also executing in field. So also for society will experience of the constraint if we like to follow to participate in pushing PNS to be non-stopped by more positive behavioral. To increase positive behavior of PNS need the existence of approach having the character of holistic and comprehensive is so that needed by some approach that is : Legal Approach, Moral Approach, Administrative Approach, Ethos Approach work,. (2) Correction punish needed to can push the behavior PNS of up at more dynamic and constructive. Law correction have to can push the bureaucracy for the fox of can be behavioral of PNS so that service given accountable to public. Straightening of law and correction of law and regulation in public service shall can create the fair service and as according to demand society. This matter as according to Ground democratize especially go together the procedure and substance in governance management, good in the form of decision making and also in the form of realization. (3) Professionalism Development as Behavioral development pattern of PNS represent the correct matter. Because in behavioral Professionalism hence PNS will always relied on a order punish the, Code Etik and also transparency and accountable in giving service to public. With the professionalism PNS not merely making account of society however also will balance the state importance, society and also PNS itself. Professionalism not merely for the PNS just technical shares

however professionalism is also claimed for PNS becoming functionary ground floor and also for.

As for suggestion given is : (1) Need of existence of study go together to the number of law and regulation arranging about behavior PNS. This Matter is intended so that there is special regulation go together the behavior PNS. This Matter is intended so that there is special regulation go together the behavior PNS so that problem of exist in perceivable field easily for PNS itself and also by society. So that is thereby expected will be able to more guidance as an behavioral reference to increase PNS more positive. (2) PNS require to be non-stopped to be developed by up at which professional progressively so that image PNS will be positive progressively and respected the society. development Professionalism which cymbal have by government have to be non-stopped to be greeted with the more order of implementation so that really can be felt by society and really bring the this nation and state become more go forward and cultured. (3) The importance Law Inforcement

Majors Punish The Administration of State of Faculty Law UNAIR

Defrayed The : DIKTI, Directorate of Research and Devotion To Society

Contract No : 318/SP3/PP/DP2M/II/2006 date of 1 Februari 2006